Tersedia online di: http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/JP
e-mail:jurnalpari@gmail.com
JURNAL PARI
Volume 11 Nomor 2 Desember 2025
p-ISSN: 2502-0730
e-ISSN : 2549-0133



REFORMASI PENERIMAAN TARUNA BARU BERBASIS KESETARAAN GENDER UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI INDUSTRI PERIKANAN TANGKAP

Don Bapkas Nisnoni

Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Indonesia

e-mail : don.nisnoni@gmail.com

Diterima tanggal: 15 Oktober 2025; diterima setelah perbaikan: 20 November 2025; Disetujui terbit: 27 November 2025

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji rendahnya partisipasi perempuan dalam industri perikanan tangkap di Indonesia yang tercatat 12,3%, lebih rendah dibandingkan rerata ASEAN (28,5%) serta kontribusi perempuan secara global di sepanjang rantai nilai perikanan (47%). Kesenjangan tersebut mencerminkan hambatan struktural, kultural, dan institusional, terutama pada akses perempuan terhadap pendidikan vokasi, pelatihan, dan peluang kerja formal di sektor perikanan. Kajian ini bertujuan merumuskan opsi kebijakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan melalui penguatan keterkaitan (*link and match*) antara pendidikan vokasi kelautan dan perikanan dengan kebutuhan industri perikanan tangkap. Analisis dilakukan menggunakan *policy analysis framework* untuk menilai tiga alternatif kebijakan berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, kelayakan implementasi, dan dampak jangka panjang. Hasil analisis menunjukkan bahwa reformasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru/Penerimaan Taruna Baru (PENTARU) berbasis kesetaraan gender merupakan alternatif paling layak dan strategis karena secara langsung menghapus hambatan formal akses perempuan ke program studi berbasis produksi. Reformasi ini dirancang bertahap melalui: (1) penetapan kuota afirmatif minimal 30% peserta perempuan, (2) penguatan kapasitas kelembagaan serta fasilitas pembelajaran yang responsif gender, dan (3) penguatan kemitraan industri inklusif melalui mekanisme sertifikasi kesetaraan gender. Implementasi kebijakan memerlukan koordinasi multi-level antara KKP, lsatuan pendidikan vokasi, dan pelaku industri untuk membangun ekosistem pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang inklusif, adil, dan mendukung pertumbuhan ekonomi biru berkelanjutan.

Kata kunci: kesetaraan gender; pendidikan vokasi KP; perikanan tangkap; partisipasi perempuan; link and match; ekonomi biru.

ABSTRACT

This paper examines the low participation of women in Indonesia's capture fisheries industry, which stands at 12.3%, significantly below the ASEAN average (28.5%) women's global contribution across the fisheries value chain (47%). This disparity reflects persistent structural, cultural, and institutional barriers particularly in women's access to vocational education, skills training, and formal employment opportunities in capture fisheries. The study aims to formulate policy measures to enhance women's involvement by strengthening the linkage (link and match) between marine and fisheries vocational education and the capture fisheries industry. The analysis employs a policy analysis framework to assess three policy alternatives based on criteria of effectiveness, efficiency, implementability, and long-term impact. The results indicate the reforming of the Admission Policy (PENTARU)policy based on gender equality is the most feasible and strategic option, as it directly removes formal barriers limiting women's access to production-oriented study programs. The reform is proposed to be implemented in a phased menner through: (1) the establishment of a minimum 30% affirmative quota for female students, (2) strengthening institutional capacity and gender-responsive learning facilities, and (3) promoting inclusive industry partnerships through gender equality certification mechanisms. Effective implementation of this policy requires multi-level coordination among the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, vocational education institutions, and industry stakeholders to foster an inclusive, equitable, and sustainable marine and fisheries

Korespondensi penulis:
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat
email : don.nisnoni@gmail.com

Copyright © 2025, Jurnal Pari

vocational education system that supports blue economy development.

Keywords: gender equality; marine and fisheries vocational education; capture fisheries; women participation; link and match; blue economy.

PENDAHULUAN

Sektor perikanan tangkap merupakan salah satu pilar utama ekonomi kelautan Indonesia. Pada tahun 2023, nilai ekspor hasil perikanan mencapai USD 5,51 miliar, menempatkan Indonesia sebagai eksportir keempat terbesar dunia setelah Tiongkok, Norwegia, dan Vietnam. Selain berkontribusi signifikan terhadap devisa negara, sektor ini juga menjadi sumber penghidupan bagi lebih dari 6 juta tenaga kerja atau sekitar 4,7% dari total angkatan kerja nasional (BPS, 2024). Namun, di balik peran strategis tersebut, sektor perikanan tangkap masih menghadapi tantangan struktural yang serius, salah satunya berupa kesenjangan gender yang persisten dan belum tertangani secara sistemik.

Data nasional menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam industri perikanan tangkap masih sangat terbatas. Perempuan hanya berkontribusi sekitar 5,7% dari total tenaga kerja sektor ini, dengan sebagian besar terkonsentrasi pada aktivitas non produksi seperti pengolahan dan pemasaran (23,4%). Sebaliknya, keterlibatan perempuan pada aktivitas produksi utama, seperti penangkapan ikan, permesinan, dan navigasi kapal, hanya mencapai 3,5%, bidang yang secara historis dan kultural didominasi oleh laki-laki (BPS, 2024). Pola ini mencerminkan adanya segmentasi gender yang kuat di sepanjang rantai nilai perikanan tangkap, di mana perempuan cenderung terpinggirkan dari sektor-sektor bernilai ekonomi tinggi dan strategis.

Salah satu faktor utama yang memperkuat kesenjangan tersebut adalah rendahnya akses perempuan terhadap pendidikan vokasi kelautan dan perikanan (KP), khususnya pada bidang teknis perikanan tangkap yang mencakup teknologi, mekanisasi, dan operasional kapal. Meskipun sistem pendidikan vokasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah berkembang dengan dukungan 9 Politeknik KP, 7 Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM), dan 1 Akademi Komunitas KP, partisipasi peserta didik perempuan pada program studi teknis perikanan tangkap tercatat stagnan pada angka 0. Data pendidikan vokasi KP menunjukkan adanya segregasi gender yang tajam antar program studi. Program studi teknis berbasis produksi seperti Teknologi Penangkapan Ikan, Teknik Penangkapan Ikan, Perikanan Tangkap, Permesinan Perikanan, Mekanisasi Perikanan, dan Permesinan Kapal, didominasi sepenuhnya oleh peserta didik laki-laki. Sebaliknya, pada program studi Teknologi Hasil Perikanan yang berfokus pada pengolahan pascapanen, perempuan justru mendominasi hingga 71%, sementara pada Budidaya Ikan dan Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan komposisinya relatif seimbang (49% - 53,4%) (KKP, 2024). Kondisi ini menunjukkan terjadinya segregasi horizontal dalam pendidikan vokasi KP, di mana perempuan terkonsentrasi pada bidang non-produksi yang bernilai ekonomi lebih rendah, sementara akses terhadap bidang produksi strategis masih sangat terbatas.

Kesenjangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebijakan institusional yang secara eksplisit membatasi akses perempuan. Kebijakan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP (BPPSDM KP), sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Pelaksana Tugas Kepala Pusat Pendidikan KP Nomor B.752/BPPSDM.3/RSDM.410/III/2025 tentang Perubahan atas Pengumuman Nomor B.524/BPPSDM/RSDM.410/II/2025 Tentang Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi di Lingkungan KKP Tahun Akademik 2025/2026, secara tegas menyatakan bahwa program studi Teknologi Penangkapan Ikan, Teknik Penangkapan Ikan, Perikanan Tangkap, Nautika Kapal Penangkap Ikan, Permesinan Perikanan, Mekanisasi Perikanan, dan Permesinan Kapal hanya diperuntukkan bagi peserta laki-laki. Implikasi dari kebijakan ini adalah terakumulasinya peserta didik perempuan pada sektor hilir perikanan, yang memiliki nilai ekonomi dan peluang karier relatif lebih rendah dibandingkan sektor hulu seperti penangkapan ikan dan operasional kapal. Akibatnya, peluang perempuan untuk berpartisipasi dalam posisi strategis dan produktif di industri perikanan tangkap menjadi semakin terbatas, memperkuat ketimpangan struktural dalam akses terhadap teknologi, pendapatan, dan kepemimpinan di sektor KP.

Kebijakan pembatasan akses tersebut juga menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara praktik kelembagaan dan kerangka regulasi nasional. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Lingkungan KKP secara jelas menegaskan prinsip kesetaraan dan inklusivitas dalam akses pendidikan dan pelatihan bagi laki-laki dan perempuan. Namun, dalam implementasinya di tingkat pendidikan vokasi KP, prinsip tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam kebijakan operasional penerimaan peserta didik. Pembatasan ini juga tidak didukung oleh dasar argumentatif yang memadai, dan lebih banyak berangkat dari stereotip sosial mengenai peran dan kemampuan perempuan. Stereotip bahwa pekerjaan teknis bersifat kotor, berat, dan berbahaya (*dirty, difficult, dangerous*/3D) kerap digunakan untuk membenarkan eksklusi perempuan dari sektor-sektor

Copyright © 2025, Jurnal Pari

teknis, meskipun tidak berbasis pada bukti kapasitas atau kompetensi (Heilman *et al*., 2024)

Berdasarkan hasil analisis Urgency, *Seriousness and Growth* (USG), pembatasan akses perempuan terhadap program studi teknis perikanan tangkap dan permesinan merupakan yang paling mendesak dan serius. Kebijakan ini terbukti menyebabkan stagnasi peserta didik perempuan pada bidang penangkapan ikan sekaligus memperkuat segregasi gender horizontal dalam sistem pendidikan vokasi KP. Dampaknya tidak berhenti pada tahap Pendidikan, tetapi berlanjut pada rendahnya keterlibatan perempuan dalam pekerjaan bernilai ekonomi tinggi serta minimnya representasi mereka dalam posisi strategis dan kepemimpinan di sektor perikanan tangkap. Masalah ini menjadi akar dari berbagai persoalan turunan, termasuk lemahnya kurikulum responsif gender, belum terciptanya lingkungan belajar yang inklusif, dan terbatasnya kemitraan pendidikan vokasi dengan dunia industri yang menerapkan prinsip kesetaraan gender.

Masalah ini juga berdampak strategis terhadap capaian pembangunan nasional, khususnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Growth* (SDG) 4 (Pendidikan Berkualitas) dan SDG 5 tentang Kesetaraan Gender, serta berpotensi mempengaruhi kinerja KKP dalam evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya sebagai indikator pengarusutamaan gender di lingkungan kementerian.

METODOLOGI

Berdasarkan urgensi permasalahan yang diidentifikasi, kajian ini difokuskan pada tiga dimensi analitis yang saling berkaitan. Pertama, kesenjangan akses dan partisipasi dalam pendidikan vokasi kelautan dan perikanan (KP), khususnya dalam konteks perbedaan kesempatan berbasis gender. Kedua, aspek kelembagaan dan implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam sistem pendidikan vokasi KP, yang berperan dalam menjamin prinsip kesetaraan dan keadilan bagi peserta didik. Ketiga, keterkaitan antara pendidikan vokasi dan dunia kerja (*link and match*), sebagai indikator sejauh mana pendidikan vokasi mampu menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja dan mendukung peningkatan daya saing sumber daya manusia di sektor perikanan tangkap.

Analisis dilaksanakan pada periode bulan September–Oktober tahun 2025 dengan menggunakan data peserta didik dari 19 satuan pendidikan vokasi KP Tahun Akademik 2025/2026. Kajian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan (*policy analysis*) dengan kerangka *policy analysis framework* yang dikembangkan oleh William N. Dunn (2018). Kerangka ini digunakan untuk menilai dan membandingkan alternatif kebijakan berdasarkan lima kriteria utama, yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, dan kelayakan politik. Setiap alternatif kebijakan dinilai menggunakan skala ordinal 1–5, di mana skor 1 menunjukkan tingkat pencapaian sangat rendah dan skor 5 menunjukkan tingkat pencapaian sangat tinggi.

Penilaian terhadap alternatif kebijakan dilakukan melalui analisis kualitatif-komparatif yang bersifat normatif-analitis, dengan mempertimbangkan kesesuaian regulasi, kapasitas kelembagaan, serta konteks sosial dan politik implementasi kebijakan di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan identifikasi kebijakan yang tidak hanya efektif dalam menjawab akar permasalahan kesenjangan gender, tetapi juga realistis dan layak diimplementasikan dalam sistem pendidikan vokasi KP yang ada.

Hasil kajian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang bersifat operasional dan berbasis bukti (*evidence-based policy*) untuk memperkuat integrasi prinsip *Gender Equality and Social Inclusion* (GESI) dalam sistem pendidikan vokasi KP. Dengan demikian, kajian ini diarahkan untuk mendukung terwujudnya sektor perikanan tangkap yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan sebagai bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesenjangan Gender dalam Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 menyediakan landasan normatif bagi pengarusutamaan gender di lingkungan KKP. Namun hasil analisis menunjukkan adanya kesenjangan implementasi yang signifikan antara tujuan kebijakan dan praktik di tingkat satuan pendidikan vokasi. Ketimpangan gender dalam pendidikan vokasi KP tidak semata-mata tercermin dari rendahnya jumlah peserta didik perempuan, melainkan merupakan manifestasi dari hambatan struktural yang mencakup kebijakan institusional, norma sosial budaya, serta keterkaitan pendidikan vokasi dengan dunia kerja.

Secara empiris, partisipasi perempuan pada program studi teknis perikanan tangkap dan permesinan tercatat sangat rendah, bahkan mencapai 0% pada beberapa program studi teknis akibat pembatasan aksesnya (KKP, 2024). Kondisi ini kontras dengan partisipasi perempuan pada program studi Teknologi Hasil Perikanan yang mencapai sekitar 71%, serta pada bidang budidaya dan pengelolaan sumber daya perairan yang relatif lebih seimbang. Pola tersebut mengindikasikan terjadinya segregasi gender horizontal dalam sistem pendidikan vokasi KP, di mana perempuan terkonsentrasi pada bidang non-produksi dengan nilai ekonomi relatif lebih rendah dan akses terhadap bidang produksi strategis masih terbatas.

Copyright © 2025, Jurnal Pari

Temuan ini sejalan dengan kajian UNESCO (2022) yang menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan teknis yang tampak netral gender dapat memperkuat ketimpangan apabila mengabaikan perbedaan kebutuhan dan pengalaman antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks pendidikan vokasi, kurikulum dan praktik pembelajaran cenderung merepresentasikan bidang teknis perikanan tangkap sebagai domain maskulin, sementara kontribusi perempuan dalam rantai nilai perikanan, termasuk pengolahan hasil tangkap, rantai pasok, dan aktivitas sosial-ekonomi belum terintegrasi secara memadai dalam materi ajar maupun kegiatan pembelajaran (PAIR, 2020).

2. Faktor Institusional dan Lingkungan Pembelajaran

Kesenjangan gender tersebut diperkuat oleh desain fasilitas pendidikan vokasi yang belum sepenuhnya responsif gender. Fasilitas teknis seperti kapal latih, bengkel permesinan, simulator kapal, dan ruang pelatihan keselamatan umumnya dirancang tanpa mempertimbangkan aspek keamanan, kenyamanan, serta aksesibilitas bagi peserta didik perempuan, termasuk ketersediaan ruang ganti dan sanitasi terpisah, kesesuaian peralatan, serta mekanisme pengawasan keselamatan. Kondisi ini membentuk lingkungan belajar yang tidak kondusif dan secara tidak langsung memperkuat *stereotip* bahwa bidang teknis perikanan tangkap hanya layak diakses oleh laki-laki.

Fenomena tersebut konsisten dengan temuan IMO-WISTA (2021) yang mencatat bahwa perempuan hanya mewakili sekitar 2% lulusan pendidikan maritim secara global, jauh lebih rendah dibandingkan partisipasi perempuan pada pendidikan vokasi secara umum yangmencapai sekitar 42,87% (UNESCO, 2018). Pada tingkat nasional, data WRI Indonesia (2021) menunjukkan bahwa perempuan hanya terlibat sekitar 4% pada sektor perikanan tangkap, sementara keterlibatan mereka di sektor pasca-panen dan pengolahan hasil mencapai 42%. Perbedaan ini menegaskan adanya segmentasi gender yang kuat di sepanjang rantai nilai perikanan dan memperlihatkan bahwa hambatan akses perempuan tidak berhenti pada tahap pendidikan, tetapi berkelindan dengan struktur kesempatan kerja.

Kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi aktual pada aspek akses, kurikulum–fasilitas, serta keterkaitan pendidikan dengan dunia kerja dirangkum pada Tabel 1.

3. Analisis Kelembagaan dan Implementasi Pengarusutamaan Gender

Penerapan Peraturan Menteri KP Nomor 43 Tahun 2023 memberikan kerangka hukum untuk memperkuat kesetaraan gender di lingkungan KKP, termasuk pendidikan vokasi. Namun, hasil telaah kelembagaan menunjukkan bahwa kebijakan ini belum diimplementasi secara efektif di tingkat satuan pendidikan (KKP, 2023). Sebagian unit pendidikan vokasi belum memiliki struktur kelembagaan PUG yang berfungsi secara strategis, dan integrasi gender belum menjadi bagian dari siklus kebijakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Implementasi PUG saat ini masih cenderung administratif, misalnya pelaporan kegiatan atau pencantuman terminologi kesetaraan gender tanpa perubahan substantif dalam tata kelola lembaga. Temuan ini sejalan dengan laporan World Bank (2024) yang menilai bahwa banyak lembaga pendidikan di Indonesia masih berada pada tahap *symbolic adoption* PUG, belum mencapai institutional mainstreaming.

Dalam kondisi ideal, sistem kelembagaan pendidikan vokasi perlu menerapkan empat pilar PUG, yaitu: (1) dukungan regulasi dan kelembagaan, (2) peningkatan kapasitas sumber daya manusia,

Tabel 1. Analisis Kesenjangan Gender dalam Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan.

Aspek Penilaian	Kondisi Ideal	Kondisi Aktual	Kesenjangan	Arah Kebijakan
1. Akses dan Partisipasi	Perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan setara dalam pendaftaran dan penerimaan peserta didik	Partisipasi perempuan sangat rendah (0%) pada bidang teknis penangkapan ikan	Ketimpangan partisipasi tinggi	Penerapan kebijakan afirmatif untuk meningkatkan akses perempuan
2. Kurikulum dan Fasilitas	Kurikulum dan fasilitas mengintegrasikan perspektif gender	Kurikulum netral gender dan fasilitas belum responsif gender	Tidak ada integrasi gender dalam pembelajaran	Reformasi kurikulum dan desain fasilitas inklusif gender
3. Link and Match Pendidikan Vokasi dan Dunia Kerja	Dunia kerja menyediakan kesempatan kerja setara dan aman	Lingkungan kerja teknis penangkapan ikan belum ramah terhadap tenaga kerja perempuan	Hambatan transisi sekolah–kerja	Penguatan jejaring industri inklusif gender

Copyright © 2025, Jurnal Pari

(3) penganggaran responsif gender, serta (4) sistem pemantauan dan evaluasi berbasis indikator kesetaraan (BAPPENAS, 2022). Tanpa mekanisme ini, kebijakan PUG berisiko berhenti sebagai dokumen normatif tanpa menghasilkan perubahan nyata di lapangan. Berdasarkan hal tersebut, penguatan kelembagaan PUG di lingkungan BPPSDM KP menjadi prasyarat penting, termasuk melalui pembentukan unit kerja yang memiliki mandat jelas, dukungan anggaran, serta indikator kinerja kesetaraan gender yang terukur. Penguatan ini memastikan penerapan PUG tidak hanya bersifat administratif, tetapi terintegrasi dalam sistem manajemen mutu pendidikan vokasi yang berorientasi pada transformasi kelembagaan.

4. Keterkaitan Pendidikan Vokasi dan Dunia Kerja (Link and Match)

Hubungan antara pendidikan vokasi dan dunia kerja (*link and match*) di sektor KP masih menghadapi tantangan bias struktural gender. Karakteristik industri perikanan, khususnya perikanan tangkap dan bidang teknis kelautan, masih bersifat maskulin, di mana lingkungan kerja di kapal, bengkel permesinan, atau pelabuhan kerap dipersepsikan berat dan berisiko tinggi, serta belum sepenuhnya menyediakan fasilitas kerja yang aman dan inklusif bagi perempuan. Kondisi ini mendorong lembaga pendidikan vokasi bersikap protektif, antara lain melalui pembatasan partisipasi perempuan dalam program studi teknis (FAO, 2020). Pendekatan protektif tersebut pada akhirnya memperkuat ketimpangan gender karena menutup peluang perempuan untuk berpartisipasi dan berkontribusi di sektor strategis kelautan.

Data KKP menunjukkan bahwa total lulusan pendidikan vokasi KP periode 2018–2024 mencapai 10.374 orang dengan tingkat penyerapan kerja sebesar 81,15%, di mana 70,52% bekerja di dunia usaha dan industri dalam negeri, 10,26% bekerja di luar negeri, dan 12,2% menjadi wirausaha. Capaian ini menindikasikan efektivitas program link and match dari sisi serapan kerja, namun ketiadaan data terpilah menurut gender membatasi evaluasi mengenai kesetaraan kesempatan kerja bagi lulusan perempuan. Untuk itu, penguatan link and match perlu dipahami bukan hanya sebagai peningkatan serapan kerja, tetapi juga sebagai upaya memastikan transisi sekolah–kerja berlangsung aman dan setara.

5. Evaluasi Alternatif Kebijakan dan Prioritas Intervensi

Berdasarkan temuan pada subbagian sebelumnya, kajian ini merumuskan tiga alternatif kebijakan yang dianalisis untuk memperkuat pendidikan vokasi KP yang inklusif gender, mencakup tahap akses pendidikan, proses pembelajaran, hingga transisi ke dunia kerja. Ketiga alternatif kebijakan tersebut disajikan pada Tabel 2.

Ketiga alternatif tersebut memiliki hubungan fungsional yang saling menguatkan. Alternatif 1 (reformasi PENTARU berbasis kesetaraan gender) berperan sebagai *entry point* untuk menghapus hambatan akses. Alternatif 2 (integrasi kurikulum dan infrastruktur responsif gender) memperkuat kualitas pembelajaran dan retensi peserta didik perempuan. Alternatif 3 (kemitraan industri–vokasi inklusif gender) memastikan keluaran pendidikan vokasi diterima secara setara di dunia kerja.

Tabel 2. Alternatif Kebijakan Penguatan Pendidikan Vokasi Inklusif Gender.

Alternatif Kebijakan	Deskripsi	Aktor Utama	Potensi Dampak
1. Reformasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru/ Penerimaan Taruna Baru (PENTARU) berbasis Kesetaraan Gender	Menghapus pembatasan akses perempuan pada program studi teknis dan menetapkan kuota afirmatif minimal 30% perempuan, untuk ke depannya sejalan dengan target Gender Parity Index UNESCO (2022).	BPPSDM KP, Pusat Pendidikan KP, Satuan Pendidikan Vokasi KP	Meningkatkan partisipasi perempuan pada program studi berbasis penangkapan ikan dari 0% menjadi minimal 15% dalam tiga tahun.
2. Integrasi Kurikulum dan Infrastruktur Responsif Gender	Menyusun kurikulum dan fasilitas pembelajaran yang mempertimbangkan kebutuhan perempuan, termasuk toilet terpisah, ruang aman di kapal latih, dan modul keselamatan kerja perempuan.	Pusat Pendidikan KP, Industri Perikanan, Organisasi Perempuan	Meningkatkan kenyamanan dan retensi belajar peserta didik perempuan
3. Skema Kemitraan Industri–Pendidikan Vokasi Inklusif Gender	Mewajibkan industri mitra menyediakan lingkungan kerja ramah gender melalui sertifikasi kesetaraan gender, serta indikator kesetaraan upah dan pelatihan teknis.	BPPSDM KP, Industri Perikanan, KADIN	Meningkatkan penyerapan kerja lulusan perempuan dari 35% menjadi 50% dalam lima tahun.

Copyright © 2025, Jurnal Pari

Tabel 3. Analisis Alternatif Kebijakan dengan Pendekatan Metode William N. Dunn.

Alternatif Kebijakan	Efektivitas	Efisiensi	Kelayakan Implementasi	Dampak Jangka Panjang	Total Skor	Keterangan
1. Reformasi Kebijakan PENTARU berbasis Kesetaraan Gender	Sangat tinggi (5)	Sangat tinggi (5)	Sangat tinggi (5)	Tinggi (4)	19	Memberikan dampak langsung terhadap peningkatan partisipasi perempuan dengan biaya rendah dan dukungan politik kuat; menjadi *entry point* reformasi struktural pendidikan vokasi.
2. Integrasi Kurikulum dan Infrastruktur Responsif Gender	Tinggi (4)	Rendah (2)	Sedang (3)	Tinggi (4)	13	Meningkatkan kualitas dan kenyamanan belajar perempuan, namun membutuhkan investasi infrastruktur besar dan koordinasi lintas unit yang kompleks.
3. Skema Kemitraan Industri–Pendidikan Vokasi Inklusif Gender	Tinggi (4)	Cukup tinggi (4)	Tinggi (4)	Sangat tinggi (5)	17	Memperkuat transisi pendidikan vokasi–industri dan meningkatkan serapan kerja lulusan perempuan; relevan untuk keberlanjutan ekonomi biru inklusif.

Untuk menentukan prioritas intervensi, ketiga alternatif dibandingkan menggunakan kerangka analisis kebijakan William N. Dunn (2018). Hasil penilaian komparatif (efektivitas, efisiensi, kelayakan implementasi, dan dampak jangka panjang) dirangkum pada Tabel 3.

Hasil pada Tabel 3 menunjukkan bahwa reformasi PENTARU berbasis kesetaraan gender memperoleh skor tertinggi. Secara analitis, alternatif ini diprioritaskan karena menyasar akar persoalan pada tahap paling awal (akses), relatif efisien dari sisi kebutuhan sumber daya, dan memiliki kelayakan implementasi yang tinggi karena didukung kerangka regulasi PUG serta kapasitas kelembagaan BPPSDM KP. Dengan demikian, reformasi PENTARU dapat dipahami sebagai intervensi yang berpotensi menghasilkan dampak sistemik terhadap struktur partisipasi, proses pembelajaran, dan peluang transisi ke dunia kerja.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kesenjangan partisipasi perempuan dalam industri perikanan tangkap di Indonesia merupakan persoalan struktural dan multidimensional yang berkelindan dengan sistem pendidikan vokasi KP. Hasil analisis menunjukkan bahwa eksklusi perempuan dari program studi teknis perikanan tangkap dan permesinan dipengaruhi oleh kombinasi kebijakan penerimaan peserta didik, lingkungan pembelajaran yang belum responsif gender, serta bias struktural dalam transisi sekolah–kerja. Segregasi gender horizontal dalam pendidikan vokasi KP menempatkan perempuan pada bidang non-produksi, sementara akses terhadap bidang produksi strategis yang bernilai ekonomi lebih tinggi masih terbatas.

Dalam konteks tersebut, evaluasi alternatif kebijakan menunjukkan bahwa reformasi kebijakan PENTARU berbasis kesetaraan gender merupakan intervensi prioritas. Alternatif ini memperoleh skor tertinggi dalam analisis Dunn karena dinilai efektif menyasar hambatan akses, efisien dari sisi kebutuhan sumber daya, serta layak diimplementasikan dalam struktur kelembagaan yang ada, dengan dukungan regulasi PUG dan arah pembangunan nasional. Secara proyektif, kebijakan afirmatif dalam seleksi peserta didik berpotensi meningkatkan partisipasi perempuan pada program studi teknis hingga mencapai 15% dalam tiga tahun, sepanjang disertai dukungan implementasi lintas aktor.

Saran

Rekomendasi utama kajian ini adalah implementasi reformasi kebijakan PENTARU berbasis kesetaraan gender sebagai *entry point* perbaikan sistemik pendidikan vokasi KP. Kebijakan ini diarahkan pada penghapusan hambatan struktural akses perempuan

Copyright © 2025, Jurnal Pari

melalui penetapan kuota afirmatif dan penyesuaian mekanisme penerimaan peserta didik agar lebih adil dan inklusif.

Agar reformasi PENTARU menghasilkan dampak yang berkelanjutan, implementasinya perlu disejajarkan dengan penguatan kelembagaan PUG (empat pilar PUG) serta penguatan link and match yang aman dan inklusif. Secara operasional, langkah implementasi dapat dilakukan bertahap melalui: (1) penyesuaian regulasi internal dan pedoman teknis PENTARU responsif gender, termasuk adopsi kuota afirmatif minimal 30% peserta perempuan; (2) penguatan kapasitas dan sarana pembelajaran yang mendukung partisipasi perempuan, termasuk pelatihan GESI bagi pengelola dan pendidik, serta penyediaan fasilitas pendukung; dan (3) pembentukan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang memanfaatkan data terpilah gender, termasuk pembentukan *Gender Focal Point* (GFP) pada satuan pendidikan vokasi.

Tabel 4. Usulan Kerangka Implementasi Kebijakan Reformasi PENTARU Berbasis Kesetaraan Gender.

Tahap / Waktu Pelaksanaan	Tujuan Strategis	Langkah Utama	Indikator Keberhasilan	Pelaksana Utama	Mitra dan Pendukung
Tahap 1 – Reformasi Regulasi (Usulan 2025)	Menetapkan dasar hukum dan kebijakan afirmatif gender dalam sistem PENTARU	• Mengusulkan revisi kebijakan Badan PPSDM KP tentang PENTARU • Menetapkan kuota afirmatif 30% peserta perempuan di seluruh program studi • Menyusun juknis PENTARU responsif gender	• Regulasi dan juknis baru diterbitkan • Kuota afirmatif diadopsi secara nasional	BPPSDM KP	Biro Hukum KKP, KemenPPPA, BAPPENAS
Tahap 2 – Penguatan Kapasitas dan Fasilitas (Usulan 2026–2027)	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan infrastruktur pembelajaran yang aman dan inklusif gender	• Pelatihan GESI bagi dosen dan pimpinan vokasi • Penyusunan kurikulum dan modul pelatihan berbasis gender. • Pembangunan fasilitas pendukung (toilet terpisah, ruang ganti, area aman di kapal latih)	• 80% satuan pendidikan memiliki kurikulum dan fasilitas responsif gender • Peningkatan jumlah pendaftar perempuan di prodi teknis	Pusat Pendidikan KP	BPPSDM KP, Pemda, Mitra Pembangunan, KemenPPPA
Tahap 3 – Penguatan Kemitraan Industri Inklusif (Usulan 2027–2030)	Menjamin keberlanjutan hasil kebijakan melalui kemitraan industri yang setara gender	• Penerapan sertifikasi setara gender untuk industri mitra • Pengawasan kesetaraan upah, pelatihan, dan kesempatan kerja bagi perempuan • Penyusunan pedoman monitoring industri inklusif	• 30 industri mitra tersertifikasi setara gender • Penyerapan kerja lulusan perempuan mencapai 50%	BPPSDM KP, Ditjen Perikanan Tangkap, KADIN	Kemenaker, BAPENAS, Asosiasi Industri Perikanan
Tahap 4 – Monitoring, Evaluasi, dan Replikasi (Usulan 2025–2030)	Memastikan efektivitas, akuntabilitas, dan replikasi kebijakan ke lembaga lain	• Pembentukan Tim Monev Terpadu Gender Vokasi • Pelaporan capaian tahunan kebijakan • Diseminasi praktik baik ke satuan pendidikan vokasi lain	• Laporan Monev tahunan diterbitkan • Replikasi kebijakan di ≥10 lembaga vokasi KP	BPPSDM KP	Inspektorat Jenderal KKP, KemenPPPA, Lembaga Riset, Media

Copyright © 2025, Jurnal Pari

Sebagai penguatan sosial, strategi komunikasi publik melalui kampanye edukatif diperlukan untuk mengurangi stereotip pekerjaan teknis perikanan sebagai domain maskulin dan membangun dukungan masyarakat terhadap peningkatan partisipasi perempuan di bidang teknis perikanan tangkap. Dengan desain kebijakan yang konsisten dan koordinasi lintas sektor (KKP, pemerintah daerah, lembaga vokasi, serta mitra industri), reformasi PENTARU berpotensi menjadi model pengarusutamaan gender dalam pendidikan vokasi sektor KP dan mendukung agenda ekonomi biru yang berkeadilan sosial. Rencana implementasi kebijakan reformasi PENTARU berbasis kesetaraan gender dapat dilihat pada Tabel 4.

Usulan kebijakan ini menempatkan Reformasi Regulasi PENTARU Berbasis Kesetaraan Gender sebagai langkah awal yang paling strategis, karena menjadi pintu masuk perubahan struktural di sistem pendidikan vokasi. Setelah fondasi regulasi terbentuk, peningkatan kapasitas lembaga dan fasilitas inklusif menjadi fokus agar transformasi berjalan menyeluruh. Tahapan berikutnya diarahkan pada pembentukan ekosistem industri yang adil gender, melalui sertifikasi dan kemitraan setara. Seluruh tahapan tersebut diusulkan agar berjalan dalam satu kerangka koordinasi KKP sebagai focal institution, dengan dukungan lintas kementerian dan mitra industri. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan partisipasi perempuan di bidang teknis perikanan, tetapi juga menciptakan model pendidikan vokasi berkeadilan sosial, berdaya saing, dan berkelanjutan di sektor KP Indonesia.

Pelaksanaan kebijakan ini harus diiringi dengan strategi komunikasi publik yang kuat, melalui suatu kampanye edukatif nasional yang menampilkan potensi dan peran perempuan di laut, untuk mengubah persepsi sosial dan mendorong dukungan masyarakat terhadap peningkatan partisipasi perempuan di bidang teknis perikanan tangkap. Pendekatan ini penting untuk menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa perempuan memiliki potensi besar dalam memperkuat bidang perikanan tangkap dan mempercepat transformasi ekonomi biru yang inklusif.

Secara keseluruhan, Reformasi Kebijakan PENTARU berbasis Kesetaraan Gender merupakan kebijakan prioritas yang tidak hanya memberikan dampak langsung terhadap peningkatan partisipasi perempuan di bidang teknis penangkapan ikan, tetapi juga menciptakan perubahan struktural yang berkelanjutan dalam sistem pendidikan vokasi KP. Kebijakan ini diharapkan menjadi model nasional dalam membangun ekosistem pendidikan yang adil, adaptif, dan berorientasi pada penguatan peran perempuan sebagai motor penggerak pembangunan KP Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). (2024). *Laporan Capaian SDGs Indonesia.* Kementerian PPN/BAPPENAS.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). (2022). *Panduan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (GESI) dalam Pembangunan Rendah Karbon dan Tanggap Perubahan Iklim.* Jakarta: Kementerian PPN/BAPPENAS.

Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2024.* 21, 267. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Perusahaan Penangkapan Ikan.* Volume 2. Badan Pusat Statistik.

Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach (6th ed.).* Routledge.

Putri, A., Fardani, M., Ignasha, N., Farliana, N., & Chairunnisa, N. A. (2025). Pengaruh Gender Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pada Provinsi Di Indonesia Tahun 2023. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, 22*(1), 25–33.

Food and Agriculture Organization. (2020). *Gender in aquaculture and fisheries: The role of women in sustainable development.* Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Heilman, M. E., Caleo, S., & Manzi, F. (2025). Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior Women at Work: Pathways from Gender Stereotypes to Gender Bias and Discrimination. *Annu. Rev. Organ. Psychol. Organ. Behav. 2024, 11*, 165–192. https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-110721

International Labour Organization. (2021). *Women at Work in the Blue Economy: Promoting Gender equality in Fisheries and Maritime Sectors*. Geneva: International Labour Organization.

International Maritime Organization (IMO) & Women's International Shipping & Trading Association (WISTA). (2021). *Women in Maritime Survey 2021.* International Maritime Organization.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2023). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Lingkungan KKP.* Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Copyright © 2025, Jurnal Pari

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2023). *Statistik Kelautan dan Perikanan Indonesia 2023*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS. (2022). *Laporan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGS) Tahun 2022.* Jakarta: Kementerian PPN/BAPPENAS.

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA). (2023). *Laporan Tahunan Kondisi Nelayan Indonesia 2023.* Jakarta: Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan.

Nuraeni, Y., & Lilin Suryono, I. (2021). Analysis of Gender Equality on Employment In Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 20*(1), 68–79.

Nurlaili, N., Hikmah, H., Kurniawan, T., & Widihastuti, R. (2021). Strategy for Strengthening Gender Mainstreaming (PUG) in the Marine and Fisheries Sector. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 674*, 012090.

Partnership of Australia-Indonesia Research (PAIR) Australia–Indonesia Centre (AIC). (2020). *Gender in aquaculture: Lessons from Indonesia's coastal communities.* Melbourne: Australia–Indonesia Centre.

Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan. (2025). *Pengumuman Plt. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Nomor B.752/ BPPSDM.3/RSDM.410/III/2025 tentang Perubahan atas Pengumuman Nomor B.524/BPPSDM/RSDM.410/II/2025 tentang Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Akademik 2025/2026.* Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.

United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. (2022). *Gender and TVET: Ensuring Inclusion in Technical and Vocational Education and Training.* Paris: UNESCO.

United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) Institute for Statistics (UIS). (2018). *Female Students in Upper Secondary Vocational Education (% of total students) – Indonesia*. UNESCO.

United Nations Women. (2024). *Care Work and Women in Fisheries.* United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women.

World Bank. (2024). *Economic Impact of Gender Gap in Indonesian Fisheries.* Washington, DC: World Bank.

World Resources Institute (WRI) Indonesia. (2021). *Three Reasons Why Women in Fisheries Matter for Inclusive Economic Recovery. WRI Indonesia*. https://wri-indonesia.org/en/insights/3-reasons-why-women-fisheries-matter-inclusive-economic-recovery

Copyright © 2025, Jurnal Pari

Copyright © 2025, Jurnal Pari